

SKRIPSI

PENGARUH KEUANGAN INKLUSIF TERHADAP KREDIT USAHA MIKRO KECIL DI SULAWESI SELATAN

RAHMI



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

PENGARUH INKLUSIF TERHADAP KREDIT USAHA MIKRO KECIL DI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh :

RAHMI

A11116001



Kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

SKRIPSI

PENGARUH KEUANGAN INKLUSIF TERHADAP KREDIT USAHA MIKRO KECIL DI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh:

RAHMI
A11116001

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 30 September 2020

Pembimbing I



Prof. Muhammad Amri, MA., Ph.D
NIP 19660118 199002 1 001

*Ace Djam'an.
Setelah Revisi
12/10
-020*

Pembimbing II



Fitriwati Djam'an, SE., M.Si
NIP 19800821 20050 1 2 002

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sanusi Fattan, SE., M.Si
NIP 19690413 199403 1 003

SKRIPSI

PENGARUH KEUANGAN INKLUSIF TERHADAP KREDIT USAHA MIKRO KECIL DI SULAWESI SELATAN

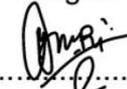
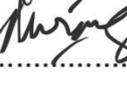
Disusun dan diajukan oleh:

RAHMI

A11116001

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **01 Desember 2020** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Muhammad Amri, MA., Ph.D	Anggota	1..... 
2.	Fitriwati Djam'an, SE., M.Si	Anggota	2..... 
3.	Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA.	Anggota	3..... 
4.	Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si.
NIP 19690413 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rahmi

NIM : A11116001

Jurusan/Program Studi : Ilmu Ekonomi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

Pengaruh Keuangan Inklusif terhadap Kredit Usaha Mikro Kecil
di Sulawesi Selatan

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 31 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



Rahmi

PRAKATA

Puji syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Dengan judul “Pengaruh Keuangan Inklusif terhadap Kredit Usaha Mikro Kecil di Sulawesi Selatan”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Bersamaan dengan kata pengantar ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril dan materil. Selain ucapan syukur kepada Allah SWT. Dan terima kasih kepada kedua orang tua saya Bapak Hasan dan Ibu Indar Wati serta kepada saudara-saudara saya yang senantiasa mendukung hingga akhir penyusunan skripsi ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Ketua Departemen Ekonomi Pembangunan Bapak Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si. dan Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, S.E., M.Si. selaku sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi, Bapak Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si. selaku penasehat Akademik penulis, serta seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terima kasih atas segala bantuan yang senantiasa diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.
4. Bapak Prof. Muhammad Amri, MA., Ph.D. selaku pembimbing I dan Ibu Fitriwati Djam'an, SE., M.Si selaku pembimbing II dalam proses penyusunan penelitian ini. Terima kasih atas kesediaan waktu, arahan, saran, dan nasihat serta ilmu pengetahuan bagi penulis.

5. Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA. dan Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, S.E., M.Si. selaku dosen penguji atas ilmu dan saran yang telah diberikan kepada penulis
6. Segenap pengawai akademik, kemahasiswaan dan perpustakaan Universitas Hassanuddin yang telah membantu proses administrasi selama proses masa studi penulis.
7. Saudara-saudari penulis, Ani, Ati, Anto dan Rahmat yang selalu membantu kehidupan saya dalam memberikan motivasi, keuangan serta doa agar dapat menyelesaikan studi dengan baik.
8. Teman-teman saya, Rahmi, Khoirunnisa, Risa Tiludak dan Raehana Tul Jannah yang telah mendukung dan memberi semangat, selalu menghibur dan bersama-sama berjuang baik susah ataupun senang hingga terselesaikannya penelitian ini.
9. Teman-teman SPHERE yang berjuang bersama-sama menyusun skripsi.

Saya telah berusaha sebaik dan semaksimal mungkin dalam membuat hasil penelitian ini, namun saya sadar banyak yang perlu dikoreksi lagi. Untuk itu saya mohon kepada semua pembaca agar memberikan kritik dan saran yang membangun agar penelitian berikutnya bisa lebih baik lagi. Akhir kata, semoga apa yang saya lakukan bisa bermanfaat bagi semua kalangan.

Makassar, 31 Januari 2021



Penulis

ABSTRAK

Pengaruh Keuangan Inklusif terhadap Kredit Usaha Mikro Kecil di Sulawesi Selatan

The Influence of Financial Inclusion on Micro and Small Business Credit in South Sulawesi

Rahmi

Prof. Muhammad Amri, MA., Ph.D

Fitriwati Djam'an, SE., M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dimensi keuangan inklusif dan faktor yang mempengaruhi kredit terhadap kredit usaha mikro kecil di Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu dimensi akses, dimensi pengguna, *Non Performing Loan* (NPL) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang mana NPL dan LDR sebagai variabel kontrol dan kredit UMK sebagai variabel dependen. Sumber data penelitian ini yaitu data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan dimensi akses, dimensi pengguna dan LDR memiliki pengaruh terhadap kredit UMK sedangkan NPL tidak memiliki pengaruh terhadap kredit UMK di Sulawesi Selatan.

Kata Kunci : Keuangan Inklusif, Kredit UMK, Kantor Bank, Rekening Kredit, NPL, LDR

This study aims to determine the effect of the dimensions of financial inclusion and the factors that affect credit on micro and small business credit in South Sulawesi. This study uses four independent variables, namely the dimensions of access, user dimensions, Non Performing Loan (NPL) and Loan to Deposit Ratio (LDR) in which NPL and LDR as control variables and micro and small business credit as dependent variables. The source of this research is secondary data. This study uses a quantitative approach and the data analysis method used is multiple linear regression. The results of this study indicate that the dimensions of access, user dimensions and LDR have an influence on micro and small business credit, while NPL has no effect on micro and small business credit in South Sulawesi.

Kata Kunci : *Financial Inclusion, Micro and Small Business Credit, Bank Offices, Credit Account, NPL, LDR*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Keuangan Inklusif.....	11
2.1.2 Kredit Usaha Mikro Kecil	15
2.1.3 <i>Non Performing Loan</i>	17
2.1.4 <i>Loan to Deposit Ratio</i>	18
2.2 Hubungan Antar Variabel	19
2.2.1 Keuangan Inklusif terhadap Kredit Usaha Mikro Kecil.....	19
2.2.2 <i>Non Performing Loan</i> terhadap Kredit Usaha Mikro Kecil.....	21

2.2.3	<i>Loan to Deposit Ratio</i> terhadap Kredit Usaha Mikro Kecil.....	22
2.3	Studi Empiris	22
2.4	Kerangka Pikir Penelitian	24
2.5	Hipotesis	26
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	27
3.1	Rancangan Penelitian	27
3.2	Tempat dan Waktu	27
3.3	Populasi dan Sampel	27
3.4	Jenis dan Sumber data.....	28
3.5	Metode Pengumpulan Data	28
3.6	Analisis Data	28
3.7	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	29
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1	Perkembangan Variabel Penelitian	31
4.1.1	Perkembangan Kredit Usaha Mikro	31
4.1.2	Perkembangan Dimensi Akses.....	32
4.1.3	Perkembangan Dimensi Pengguna	33
4.1.4	Perkembangan <i>Non Performing Loan</i>	34
4.1.5	Perkembangan <i>Loan to Deposit Ratio</i>	35
4.2	Hasil Estimasi Variabel-Variabel Penelitian	36
4.2.1	Uji statistik t	40
4.2.2	Uji Statistik F.....	40
4.2.3	Koefisien Determinasi (R^2).....	41
4.3	Pembahasan Hasil Estimasi dan Interpretasinya.....	41
4.3.1	Pengaruh Dimensi Akses terhadap Kredit UMK	41
4.3.2	Pengaruh Dimensi Pengguna terhadap Kredit UMK	43
4.3.3	Pengaruh <i>Non Performing Loan</i> terhadap Kredit UMK	44
4.3.4	Pengaruh <i>Loan to Deposit Ratio</i> terhadap Kredit UMK	45

BAB V PENUTUP.....	47
5.1 Kesimpulan	47
5.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Bagan Pikir Penelitian.....	26
4.1 Grafik Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil.....	32
4.2 Grafik Perkembangan Kantor Cabang Bank Tahun 2013-2019 Per Triwulan.....	33
4.3 Grafik Perkembangan Dimensi Pengguna Tahun 2013-2019 Per Triwulan	34
4.4 Grafik Perkembangan <i>Non Performing Loan</i> Tahun 2013-2019 Per Triwulan.....	35
4.5 Grafik Perkembangan <i>Loan to Deposit Ratio</i> Tahun 2013-2019 Per Triwulan.....	36
4.6 Hasil Estimasi Pengaruh Keuangan Inklusi terhadap Kredit Usaha Mikro Kecil.....	38

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1. 1	Jumlah dan Persentase UMK Menurut Pulau, 2016.....	3
1. 2	Persentase UMK Menurut Akses Permodalan dari Lembaga Keuangan di Sulawesi Selatan 2017	3
1. 3	Persentase Kendala yang Dihadapi oleh UKM Menuru BPS 2017.....	5
1. 4	Jumlah Rekening Kredit Per Penduduk Dewasa	8
4. 1	Hasil Estimasi Dimensi Akses, Dimensi Pengguna terhadap Kredit UMK Sebelum Adanya Variabel Kontrol	36
4. 2	Hasil Estimasi Dimensi Akses, Dimensi Pengguna terhadap Kredit UMK setelah Adanya Variabel Kontrol NPL dan LDR	37
4. 3	Nilai Korelasi Variabel Kontrol	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data Uji Regresi	52
2. Data Setelah Ln dan Metode <i>Rank Case</i>	53
3. Uji Normalitas	54
4. Uji Multikolinearitas.....	57
5. Uji Autokorelasi	57
6. Uji Korelasi Variabel Kontrol	58
7. Hasil Uji Regresi Sebelum adanya Variabel Kontrol	59
8. Hasil Uji Regresi Setelah adanya Variabel Kontrol	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu indikator yang menyumbang PDB tertinggi. Prospek UMKM sangat mendukung dan perlu untuk ditingkatkan dan perhatian lebih, khususnya pada usaha mikro. UMKM merupakan bidang yang mudah dijalankan dan juga tidak memerlukan pendidikan tinggi untuk menjalankan usaha. Oleh karena itu, sangat membantu masyarakat yang berpendidikan rendah untuk memperoleh pendapatan. UMKM mampu menyerap tenaga kerja yang banyak, karena itu dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dunia usaha Indonesia pada saat ini didominasi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK) dan juga pemerintah saat ini lebih memfokuskan pada usaha mikro. Pelaku usaha mikro terdiri dari pedagang-pedagang kecil di pinggir jalan atau warung sembako di sekitaran rumah warga yang di bangun oleh para ibu rumah tangga. Sedangkan usaha kecil seperti usaha di ruko dengan volume usaha yang lebih banyak dibandingkan pada usaha mikro, cafe, dan lain-lain.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 jumlah UMK mencapai lebih dari 26 juta usaha atau 98,33 persen dari total usaha nonpertanian di Indonesia. UMK mampu menyerap tenaga kerja Indonesia lebih dari 53 juta orang atau sekitar 76,28 persen dari total tenaga kerja nonpertanian (BPS 2017).

Berdasarkan Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan pada tahun 2019 jumlah usaha usaha mencapai 900 ribu usaha. Data Statistik Ekonomi 2016 memberikan informasi bahwa UMK telah menyerap lebih dari 2,1 juta orang atau sekitar 85,29 persen tenaga kerja non pertanian di Sulawesi Selatan, UMK tersebut merupakan usaha yang berskala kecil seperti pedagang pinggir jalan dan usaha rumahan (BPS 2019).

Usaha mikro kecil mempunyai banyak keterbatasan sehingga kebanyakan dari usaha ini tidak melanjutkan usahanya. Keterbatasan-keterbatasan tersebut diantaranya minimnya akses perbankan, kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia yang masih rendah karena rata-rata pelaku usaha ini berasal dari pendidikan yang minim sehingga pengelolaan usahanya yang kurang baik, pengetahuan teknologi yang masih minim, dan belum mampu mengimbangi perubahan selera konsumen khususnya yang berorientasi ekspor. Mengingat pentingnya peran UMK dalam menggerakkan roda perekonomian Sulawesi Selatan, maka kendala tersebut seharusnya tidak menyurutkan pelaku UMK untuk mengembangkan usaha dan bisnisnya. Jika pelaku UKM mampu melihat situasi pasar maka akan dengan mudah dalam memasarkan produknya dan akan dapat lebih berkembang karena selera konsumen berbeda dan seringkali berubah-ubah setiap waktu.

Kota Makassar sebagai ibu kota provinsi menjadi pusat pergerakan ekonomi di Sulawesi Selatan. Lebih dari 34 persen perekonomian Sulawesi Selatan tergantung pada ekonomi Kota Makassar dari 24 kabupaten kota, jumlah UMK di Kota Makassar mencapai 13,71 persen. Pada posisi kedua dan ketiga adalah Kabupaten Bone dan Kabupaten Gowa dengan jumlah UMK masing-masing 9,81 persen dan 8,55 persen (PDRB 2017). Seperti yang tertera pada **Tabel 1.1** sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase UMK Menurut Pulau, 2016

Pulau	Persentase (%)
Selatan-Selatan (Kep. Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, dan Sinjai)	16,66
Mamminasata (Makassar, Maros, Gowa, dan Takalar)	30,75
Pangkep-Ajatappareng (Pangkep, Barru, Parepare, Pinrang, dan Enrekang)	13,82
Bosowasi (Bone, Soppeng, Wajo, dan Sidrap)	23,43
Luwu dan sekitarnya (Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Palopo, Tana Toraja, dan Toraja Utara)	15,34

Sumber : Badan Pusat Statistik 2019

Berdasarkan data BPS 2017 sumber pembiayaan formal di luar bank pada UMK terhadap kredit cukup rendah. Hanya sekitar 14,44 persen saja UMK yang memperoleh kredit dari lembaga keuangan, seperti yang tertera pada **Tabel 1.2** berikut :

Tabel 1.2 Persentase UMK Menurut Akses Permodalan dari Lembaga Keuangan di Sulawesi Selatan 2017

Pernah Menerima Kredit	Tidak Pernah Menerima Kredit
14,44%	85,56%

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2019

Berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya bahwa peningkatan akses terhadap layanan keuangan dasar seperti tabungan, pembayaran, dan kredit memberikan dampak positif dan substansial dalam meningkatkan taraf

hidup masyarakat miskin (Dupas dan Robinson, 2009). Untuk pelaku usaha kecil dan menengah, permasalahan yang menjadi kendala utama dalam pertumbuhan bisnis adalah akses terhadap modal atau pembiayaan (Schiffer dan Weder, 2001).

Hasil statistik ekonomi 2016 lanjutan diperoleh informasi bahwa mayoritas UMK menggunakan sebagian uang sendiri sebagai modal awal. Hal ini merata di semua jenis aktivitas usaha dengan persentase lebih dari sembilan puluh persen. Sementara UMK yang mengandalkan modal awal dari bank hanya mencapai tiga persen. Rendahnya persentase tersebut disebabkan karena akses pada bank dinilai tidak mudah. Bagi pihak perbankan, kebijakan yang lebih ketat sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan. Selain itu pelaku UMK juga minim informasi terkait kredit pembiayaan usaha. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab kecilnya akses UMK terhadap kredit dari perbankan (BPS 2019).

Berdasarkan pada **Tabel 1.3** terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi oleh UKM. Permasalahan permodalan atau likuiditas dan adanya pesaing merupakan kendala utama yang dihadapi. Lebih dari lima puluh persen pengusaha UMK menyatakan memiliki kendala tersebut. Permodalan merupakan faktor produksi utama yang harus ada pada setiap proses produksi atau usaha. Oleh sebab itu, akses kredit dari lembaga keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk dapat meningkatkan kapasitas usaha UMKM tersebut.

Kebijakan pemerintah dalam pemberian akses kredit untuk UMKM saat ini sedang digencarkan. Lembaga keuangan saat ini telah banyak memberikan berbagai jenis kredit yang meringankan. Bank Indonesia telah mewajibkan bank umum untuk memberikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM (Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015). Namun masih kurang dari lima belas

persen usaha UMK di Sulawesi Selatan yang memperoleh atau mengajukan kredit ke lembaga keuangan. Terdapat 47 persen UMK tidak mengajukan kredit melalui lembaga keuangan dengan alasan merasa belum perlu untuk mengajukan kredit. Sedangkan bagi pengusaha yang membutuhkan kredit namun belum mengajukan atau mendapatkan kredit adalah karena alasan bunga tinggi, tidak memiliki agunan, tidak tahu prosedur, prosedur sulit, dan usulan ditolak. Sekitar 66,62 persen UMK di Sulawesi Selatan menyatakan permodalan adalah kendala dalam menjalankan bisnis (BPS, 2017). Oleh karena itu, akses kredit dari lembaga keuangan merupakan hal yang penting bagi UMK.

Tabel 1.3 Persentase Kendala yang Dihadapi oleh UKM Menurut BPS 2017

Kendala	Persentase (%)
Birokrasi	1,15
Pungutan Liar	1,25
BBM dan Energi	2,96
Lainnya	3,05
Tenaga Kerja	4,28
Infrastruktur	9,02
Barang Dagang	15,17
Pemasaran	29,52
Pesaing	55,18
Permodalan	66,62

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2019

Inklusi keuangan merupakan suatu upaya untuk melihat bagaimana akses keuangan masyarakat di suatu negara atau daerah dan mendorong masyarakat

agar dapat mengakses keuangan di lembaga keuangan formal atau perbankan. Salah satunya adalah penyaluran kredit yang dapat membantu keuangan pada para pelaku usaha baik usaha formal atau usaha rumah tangga. Keuangan inklusif merupakan langkah kebijakan oleh pemerintah Indonesia yang telah difokuskan di periode ini untuk lebih mendorong masyarakat mengakses pada lembaga keuangan khususnya pada pelaku UMKM di Indonesia.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), saat ini pandangan masyarakat Sulawesi Selatan terhadap kredit masih banyak yang takut berurusan dengan jasa keuangan. Hal inilah merupakan salah satu permasalahan kenapa tingkat inklusi keuangan di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Secara umum literasi dan inklusi masyarakat dalam berbagai industri keuangan masih relatif rendah. Kelompok masyarakat menengah bawah relatif belum mendapatkan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan dan kemampuannya.

Pemerintah mendorong inklusi keuangan di bidang UMKM khususnya pada penyaluran kredit. Sebagaimana yang telah diketahui masih banyak UMKM yang kekurangan modal dalam menjalankan usahanya. Sebagian dari mereka mengandalkan kredit kepada perbankan, namun tidak semua permintaan kredit tersebut disalurkan oleh perbankan karena suatu hal sebagai syarat kelayakan pemberian kredit.

Akses keuangan penduduk Indonesia masih sangat rendah hal ini tercermin dari tingkat inklusi keuangan yang ada di Indonesia. Menurut survei *World Bank* pada tahun 2014, keuangan inklusif di Indonesia hanya sebesar 36 persen. Dampak negatif akibat rendahnya inklusi keuangan ini yaitu masyarakat akan lebih memilih menyimpan uangnya di rumah dibandingkan menyimpannya

di bank sehingga masyarakat tidak memiliki dana untuk berjaga-jaga dan tentunya jika menabung di bank akan memperoleh keuntungan berupa bunga dan lebih terjamin keamanannya.

Dampak terhadap perekonomian Indonesia tercermin pada stabilitas sistem keuangan yaitu akan menghambat pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK, sehingga fungsi intermediasi lembaga keuangan tidak berjalan optimal. Rendahnya inklusi keuangan atau *eksklusivitas* akan memperbesar transaksi ekonomi yang tidak tercatat sehingga akan menimbulkan tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme serta mengurangi buffer bagi sistem keuangan apabila terjadi kondisi resesi.

Berdasarkan data OJK, inklusi keuangan Sulawesi Selatan pada tahun 2019 sebesar 86,91 persen sedangkan tingkat literasi 32,46 persen. Target inklusi keuangan yaitu 75 persen, hal ini sejalan dengan target tersebut sedangkan target untuk literasi keuangan tidak tercapai yaitu sebesar 35 persen. Periode Agustus 2019 sebanyak 15,6 juta rupiah jumlah rekening termasuk tabungan deposito dan dari kredit sembilan juta rupiah. Perkembangan industri jasa keuangan menunjukkan peningkatan. Aset perbankan tumbuh sebesar 6,38 persen atau 152,76 triliun rupiah. Selain itu, DPK 6,04 persen atau 99,55 triliun rupiah, dan tingkat pertumbuhan kredit 6,52 persen atau 125,37 triliun rupiah (OJK 2019).

Menurut OJK penyaluran kredit perbankan telah menyasar pada UMKM sebesar 32,97 persen dari total kredit. Hal itu sejalan dengan kinerja penyaluran kredit usaha rakyat yang realisasinya melampaui target pada tahun 2018, dari 5,4 triliun rupiah meningkat ke 6,5 triliun rupiah. Realisasi KUR per

September 2019 pun melebihi target, dari 6,63 triliun rupiah meningkat menjadi 6,80 triliun rupiah.

Tabel 1.4 Jumlah Rekening Kredit Per Penduduk Dewasa

Item	Agustus 2016	Februari 2017	Agustus 2017	Februari 2018
Jumlah Rekening Kredit	981.256	981.256	1.024.872	1.054.478
Penduduk Dewasa	6.167.955	6.209.601	6.251.377	6.290.218
Pertumbuhan	15,13%	15,80%	16,39%	16,76%

(Sumber: Biro Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah bekerja sama dengan OJK membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Pembentukan tim ini untuk mendorong keuangan inklusif di Sulawesi Selatan dengan cara memfasilitasi akses kredit UMKM melalui pola kemitraan perusahaan inti-plasma sektor pertanian, sinergi bank dan asuransi untuk pembiayaan dan pertanggung jawaban usaha pertanian atau peternakan, mendorong perbankan menyalurkan kredit kepada UMKM dengan berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah dan pendamping UMKM. TPAKD Sulawesi Selatan memfasilitasi kerja sama dengan PT Bank Sulselbar dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) untuk akselerasi penyaluran kredit dan pertanggung jawaban usaha sektor peternakan dan pertanian. Realisasi program TPAKD terhitung sampai dengan Oktober 2018 TPAKD telah memfasilitasi 4.741 UMKM dengan jumlah dana 155,19 milyar rupiah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis ingin melihat bagaimana pengaruh keuangan inklusif terhadap kredit usaha kecil mikro di Sulawesi Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut rumusan masalah penelitian ini:

1. Apakah dimensi akses berpengaruh terhadap kredit usaha mikro kecil di Sulawesi Selatan ?
2. Apakah dimensi pengguna berpengaruh terhadap kredit usaha mikro kecil di Sulawesi Selatan?
3. Apakah *non performing loan* berpengaruh terhadap kredit usaha mikro kecil di Sulawesi Selatan?
4. Apakah *loan to deposit ratio* berpengaruh terhadap kredit usaha mikro kecil di Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan sebelumnya, berikut tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dimensi akses terhadap perkembangan kredit usaha mikro kecil di Sulawesi Selatan
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dimensi pengguna terhadap perkembangan kredit usaha mikro kecil di Sulawesi Selatan

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *non performing loan* terhadap kredit usaha mikro kecil di Sulawesi Selatan
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *loan to deposit ratio* terhadap kredit usaha mikro kecil di Sulawesi Selatan

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat bagi pembaca, agar mahasiswa dapat mengetahui Keuangan Inklusif dan kredit UMK dan sebagai bahan referensi untuk pembelajaran dan penelitian.
2. Manfaat bagi peneliti, agar peneliti dapat menambah wawasan dan dapat melanjutkan meneliti lebih dalam serta dapat mengaplikasikannya.
3. Manfaat bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam pembuatan kebijakan terkait keuangan inklusif yang nantinya akan mendorong kredit UMK dan membantu permodalan UMK.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Keuangan Inklusif

Keuangan inklusif berhubungan dengan intermediasi keuangan. Miskhin (2008) mendefinisikan intermediasi keuangan sebagai suatu lembaga yang meminjam dana dari masyarakat penabung dan meminjamkannya ke pihak lain. Keuangan inklusif menurut beberapa peneliti seperti Honohan (2008), Efobi et al. (2014), Fungacova dan Weill (2015), dan Chauvet dan Jacolin (2017) mendefinisikan sebagai peningkatan akses pada lembaga keuangan formal yang dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator yaitu kepemilikan rekening di bank, penggunaan kredit, dan tabungan bank.

Inklusi keuangan menurut Pearce (2011), digunakan untuk menarik masyarakat yang belum tersentuh oleh perbankan dalam sistem keuangan formal, sedangkan (Chakravarty dan Pal, 2013) lebih menekankan pada proses menghilangkan hambatan dan mengatasi ketidakmampuan kelompok yang kurang beruntung. Menurut Chakravarty dan Pal (2013), inklusi keuangan adalah fenomena yang memiliki banyak dimensi dan beragam pada setiap daerah ataupun setiap sektor. Masyarakat yang belum tersentuh oleh lembaga keuangan disebut *financial exclusion*.

Menurut *Global Partnership of Financial Inclusion* (GPII), inklusi keuangan merupakan komponen penting dari pengembangan keuangan, dapat

meningkatkan akses layanan keuangan bagi banyak masyarakat yang menjadi prioritas bagi pembuat kebijakan. *The Global Financial Crisis (GFC) 2007-2008* menguji rasional inklusi keuangan ketika kegagalan bank berkaitan dengan inklusi keuangan (Carneiro & Ghosh, 2008).

Inklusi keuangan menurut *World Bank* dan *European Commission* adalah sebagai suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan baik dalam bentuk harga ataupun non harga terhadap akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa keuangan. Indikator utama keuangan inklusif, menurut *World Bank*, terdiri dari kepemilikan rekening, menabung di lembaga keuangan formal, dan meminjam dari lembaga keuangan formal.

Indeks keuangan inklusif merupakan suatu pengukuran untuk mengukur tingkat inklusif keuangan yang menggunakan indeks berdasarkan data makroekonomi, khususnya pada layanan sektor perbankan. Indeks keuangan inklusif atau IKI adalah langkah yang dilakukan Bank Indonesia dengan cara melihat dari beberapa dimensi keuangan diantaranya yaitu dimensi akses, dimensi penggunaan, dan dimensi kualitas.

2.1.1.1 Dimensi Akses

Dimensi Akses merupakan dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan layanan jasa keuangan formal, sehingga dapat dilihat terjadinya potensi hambatan untuk membuka dan mempergunakan rekening bank, seperti biaya atau keterjangkauan fisik layanan jasa keuangan seperti, kantor bank dan jumlah atm.

Menurut Camara dan Tuesta (2014) menyatakan bahwa tingkat inklusif keuangan ditentukan oleh tiga dimensi yaitu dimensi pemanfaatan, dimensi hambatan, dan dimensi akses. Adapun indikator pemanfaatan menurut Camara dan Tuesta yakni memiliki paling tidak satu produk keuangan, tabungan, dan memiliki kredit di lembaga keuangan formal atau perbankan. Indikator hambatan yaitu berupa pandangan individu yang tidak mengakses pada layanan perbankan. Adapun hambatan yang dimaksud yaitu jarak terhadap kantor lembaga keuangan formal, pemenuhan persyaratan berkas yang sulit dipenuhi, terkendala biaya, dan ketidakpercayaan terhadap sistem keuangan formal. Sedangkan indikator dimensi akses yaitu dilihat dari jumlah atm dan jumlah kantor bank terhadap penduduk, serta jumlah atm dan kantor bank dalam radius tertentu.

Jumlah kantor bank dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap perbankan atau jasa keuangan dan juga meningkatkan inklusi keuangan. Semakin banyak jumlah kantor bank, maka akan lebih memudahkan pihak perbankan bertemu dengan calon-calon nasabah serta akan lebih mudah mengeluarkan maupun menerima jasa perbankan baik itu kantor cabang dan yang lainnya. Chakravarty dan Pal (2013), mengemukakan bahwa jumlah kantor pusat atau cabang perbankan per jumlah penduduk dewasa merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat inklusi keuangan.

Berdasarkan Bank Indonesia bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi akses meliputi; Pertama, jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa. Kedua, jumlah kantor bank per seribu kilometer yaitu sebagai seluruh jaringan atau unit kantor bank yang tercatat dapat memberikan layanan keuangan kepada nasabah atau melakukan kegiatan operasional perbankan sebagaimana tujuannya. Kantor bank dimaksud meliputi, kantor cabang, kantor

cabang pembantu (KCP), kantor kas, unit usaha syariah, kas mobil, *payment point*, *agency*, dan *deposit taking company* (DTC). Yang dimaksud dengan jaringan kantor adalah jaringan kantor bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai bank umum dan ketentuan Bank Indonesia mengenai bank umum syariah.

Indikator ketiga, yaitu jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa, dan yang keempat, jumlah ATM per 1.000 kilometer dengan mesin ATM nasabah dapat menggunakan tarik tunai, transfer uang ke rekening lain, dan transaksi lainnya. Jumlah ATM dalam penghitungan ini adalah ATM yang tercatat sebagai aset Bank dan ATM yang dikelola dan menjadi tanggung jawab bank pelapor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Bank Umum dan ketentuan Bank Indonesia mengenai Bank Umum Syariah.

Penduduk dewasa yang dimaksud yaitu semua penduduk di suatu negara atau provinsi atau kabupaten atau kota yang berusia di atas lima belas tahun, sedangkan luas wilayah kilometer yaitu seluruh luas daratan yang merupakan wilayah administratif negara provinsi, dan kabupaten kota.

2.1.1.2 Dimensi Pengguna

Dimensi pengguna merupakan dimensi yang digunakan untuk melihat tingkat penggunaan layanan jasa keuangan yang disediakan. Yang termasuk dalam dimensi pengguna menurut Bank Indonesia yaitu jumlah rekening dana pihak ketiga baik itu berupa deposito, giro, dan tabungan dihitung per seribu penduduk dewasa dan jumlah rekening kredit per seribu penduduk dewasa.

Dana pihak ketiga merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat, dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana pihak ketiga merupakan dana yang paling banyak yang dimiliki oleh

bank, sebagaimana bahwa fungsi perbankan yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Pertumbuhan dana pihak ketiga dapat berpengaruh terhadap jumlah pertumbuhan kredit di tahun selanjutnya dimana pertumbuhan tersebut dapat menentukan tingkat keuntungan atau pendapatan suatu bank. Semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat, maka akan semakin besar pula kemampuan bank untuk kredit yang disediakan, hal ini dapat meningkatkan pendapatan bank yang akan berdampak terhadap peningkatan profitabilitas bank.

2.1.2 Kredit Usaha Mikro Kecil

Menurut Hasibuan (2007:87) bahwa pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Suyatni (2002) mendefinisikan kredit adalah adanya pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang atau kepada pihak lain, sedangkan kontra prestasi akan diterima kemudian dalam jangka waktu tertentu. Menurut Thomas (2010:93) kredit dalam pengertian umum merupakan kepercayaan atas kemampuan pihak debitur (penerima kredit) untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang.

Penyaluran kredit merupakan kegiatan usaha yang lebih dominan di perbankan. Persentase penggunaan dana untuk kredit dapat mencapai tujuh puluh persen sampai dengan delapan puluh persen dari jumlah usaha bank. Oleh karena itu, sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran kredit dan memperoleh pendapatan dari bunga kredit. Pihak perbankan lebih mengfokuskan usaha bank dalam penyaluran kredit disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, sifat bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara unit

surplus dengan unit defisit. Kedua, penyaluran kredit dapat menunjukkan suatu kepastian sehingga besarnya pendapatan dapat diperkirakan. Ketiga, sumber dana bank berasal dari dana masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Pengertian usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008 kriteria UMKM dapat digolongkan sebagai berikut; Usaha mikro apabila memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah yang mana tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau yang memperoleh hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah.

Usaha kecil yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah dengan jumlah maksimal 500 juta rupiah yang mana tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memperoleh hasil penjualan usaha per tahun lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah.

Usaha menengah yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah yang mana tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan usahanya dalam satu tahun lebih dari 2,5 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) definisi UMKM berdasarkan pada jumlah tenaga kerja. Usaha mikro yaitu usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja kurang dari lima orang. Usaha kecil yaitu usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja lima orang sampai dengan sembilan belas orang, sedangkan usaha menengah yaitu usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja dua puluh orang sampai dengan 99 orang.

2.1.3 Non Performing Loan

Menurut Ismail (2010:123), *Non Performing Loan* (NPL) atau dapat disebut sebagai kredit macet. NPL terdiri dari kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Semua kredit tersebut pada awalnya adalah kredit lancar. Saat terjadi krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997, telah terjadi pergeseran komposisi kredit yang berada pada kondisi buruk dimana semakin banyak kredit lancar masuk kredit dalam perhatian khusus, dan kredit dalam perhatian khusus menjadi kredit kurang lancar, kredit kurang lancar menjadi kredit diragukan dan kredit diragukan berpindah menjadi kredit macet sehingga kredit macet pada akhirnya menempati posisi yang cukup dominan dalam portofolio perkreditan bank umum. Kredit yang dikatakan sebagai NPL yaitu kredit atau pembiayaannya yang termasuk dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet (Kajian Ekonomi Regional Prov. Riau BI, 2008).

Non performing loan adalah tingkat pengembalian kredit yang diberikan deposan kepada bank dengan kata lain NPL merupakan tingkat kredit macet pada bank tersebut atau rasio antara pembayaran yang bermasalah dengan total pembayaran yang disalurkan. Bank Indonesia menetapkan tingkat pertumbuhan NPL maksimal lima persen sebagai angka toleransi bagi kesehatan suatu bank. Suatu kredit yang tergolong bermasalah atau macet didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut.

Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank karena kredit yang tidak kembali. Serta tidak memperoleh pendapatan dari bunga pinjaman yang diberikan. Oleh karena itu, perbankan dihibau agar lebih berhati-hati dalam

memberikan kredit dengan kata lain dapat menganalisis dan menilai nasabah sebelum memberikan kredit agar resiko kredit macet dapat diminimalisir.

2.1.4 Loan to Deposit Ratio

Menurut Mulyono (2001:101), *Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan suatu rasio dari perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan ke masyarakat dalam hal ini kredit dengan jumlah dana masyarakat atau dana pihak ketiga dan modal sendiri yang digunakan. LDR menunjukkan tingkat kemampuan suatu perbankan dalam membiayai kembali penarikan dana yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Menurut S. Scott McDonald dan Timothy W Koch (2006:581), menyebutkan bahwa semua bank dan analis bank melihat LDR sebagai alat ukur dari likuiditas bank. Sedangkan Mangasa Augustinus Sipahutar dalam bukunya yang berjudul persoalan-persoalan perbankan Indonesia menyebutkan bahwa LDR merupakan rasio antara kredit yang disalurkan perbankan terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun. Indikator ini merupakan alat ukur terhadap tingkat kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit. LDR merupakan alat ukur terhadap fungsi intermediasi suatu perbankan. Semakin tinggi rasio LDR maka semakin baik pula perbankan melakukan fungsi intermediasinya, demikian pula sebaliknya semakin rendah maka semakin rendah pula perbankan melakukan fungsi intermediasinya. Berdasarkan definisi di atas, LDR merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat likuiditas bank dan juga menjadi alat ukur terhadap fungsi intermediasi perbankan.

Semakin tinggi LDR memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan, karena jumlah dana yang

diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. LDR merupakan kemampuan bank dalam membayar kembali dana penarikan yang telah dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan kredit untuk mengetahui tingkat likuidasinya.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015 batas aman LDR pada bank berkisar antara 78 persen – 92 persen. Tinggi rendahnya tingkat LDR suatu bank akan mempengaruhi profitabilitas bank tersebut. Semakin tinggi jumlah dana yang disalurkan kepada nasabah dalam bentuk kredit maka penghasilan bunga yang diperoleh akan meningkat, hal ini akan membuat profitabilitas bank juga meningkat dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif. Apabila bank mengalami kesulitan dalam menyalurkan dana, hal ini membuat banyak dana yang menganggur dan menyebabkan tingkat profitabilitas bank menurun karena bank tidak efektif dalam menyalurkan kreditnya kepada masyarakat (Rahmi, 2014).

Jadi dapat disimpulkan bahwa LDR yang terlalu tinggi memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan, hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Sebaliknya, jika LDR yang rendah menunjukkan tingkat ekspansi kredit yang rendah dibandingkan dengan dana yang diterimanya.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Keuangan Inklusif terhadap Kredit Usaha Mikro Kecil

Berdasarkan penelitian oleh Sarma (2012), bahwa rata-rata negara-negara maju yang tergabung dalam OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) memiliki indeks keuangan inklusif yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara non OECD. Semakin tinggi nilai indeks

keuangan inklusif suatu negara maka semakin baik akses masyarakat di negara tersebut terhadap layanan lembaga keuangan formal.

Peningkatan akses keuangan melalui inklusi keuangan bertujuan meningkatkan hal perilaku masyarakat untuk menyimpan uang di lembaga perbankan dan kredit. Hal ini akan berdampak pada peningkatan stabilitas keuangan dan mengurangi resiko yang akan terjadi (Hannings & Jansen, 2010). Namun, jika inklusi keuangan diperluas ke daerah dan nasabah yang tidak amanah dalam melakukan kredit maka akan menimbulkan peningkatan kredit macet dan pada akhirnya dapat berdampak pada stabilitas keuangan.

Dalam meningkatkan penggunaan masyarakat terhadap layanan keuangan yang juga meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, penetrasi demografis perbankan dapat meningkatkan jumlah masyarakat yang menggunakan layanan keuangan. Semakin banyak kantor jaringan perbankan, maka akan semakin mudah pihak perbankan bertemu dengan calon-calon nasabah serta akan lebih mudah mengeluarkan maupun menerima jasa perbankan. Penetrasi demografis yang diukur dari jumlah kantor atau cabang perbankan per jumlah penduduk dewasa merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat inklusi keuangan (Chakravarty dan Pal, 2013).

Chakravarty dan Pal (2013) bahwa penetrasi perbankan dan ketersediaan kredit dapat membantu perkembangan inklusi keuangan, yang berarti semakin banyak masyarakat yang dapat mengambil kredit. Semakin dekat masyarakat dengan perbankan maka inklusi keuangan semakin besar lingkupnya (Allen, *et al.* 2015).

2.2.2 *Non Performing Loan* terhadap Kredit Usaha Mikro Kecil

Non performing loan adalah rasio kredit bermasalah dengan membandingkan total kredit bermasalah dengan total kredit. Tingginya NPL akan mengurangi modal pada bank, karena pendapatannya digunakan untuk menutupi tingginya NPL, sehingga akan diikuti oleh turunnya penyaluran kredit pada periode berikutnya. Hal ini akan menghambat aktivitas bank dan juga akan menurunkan pendapatan pada bank, sehingga tingginya NPL akan membuat profitabilitas rendah (Wicaksono, 2016). Kenaikan NPL akan mengakibatkan laba menurun, kenaikan kredit macet akan mengurangi pendapatan bank (Ameur & Mhiri. 2013).

Menurut Kusnandar (2012), tingginya pengembalian atas aset oleh bank, akan meningkatkan perolehan laba sehingga penyaluran kredit UMKM juga akan ikut meningkat, karena posisi bank dalam tingkat kinerja yang cukup baik. Semakin besar laba yang dihasilkan menunjukkan bahwa bank sudah mengelola asetnya dengan efektif.

Morgan dan Pontines (2014) mengemukakan bahwa hubungan antara inklusi keuangan dan stabilitas keuangan menggunakan pinjaman UKM sebagai ukuran inklusi keuangan dan rasio NPL sebagai ukuran stabilitas keuangan. Hasil penelitian menunjukkan 26 keduanya saling menguatkan. Hasil estimasi mereka menunjukkan bahwa peningkatan pangsa pinjaman kepada UKM dalam total pinjaman bank membantu stabilitas keuangan, terutama penurunan NPL. Warjiyo (2004) mengungkapkan bahwa perilaku penawaran kredit perbankan dipengaruhi seperti NPL atau kredit macet. NPL UMKM salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran kredit perbankan kepada UMKM (Nurhidayat, 2010)

2.2.3 *Loan to Deposit Rati* terhadap Kredit Usaha Mikro Kecil

Warjiyo (2004:83), menyebutkan bahwa perilaku perbankan dalam penawaran kredit atau penyaluran kredit selain dipengaruhi oleh dana yang tersedia yang bersumber dari dana pihak ketiga, juga dipengaruhi oleh pandangan bank terhadap prospek usaha nasabah dan kondisi perbankan itu sendiri seperti jumlah NPL, dan LDR yang merupakan perbandingan antara kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga. Semakin tingginya rasio LDR mencerminkan bahwa sejumlah kredit yang diberikan oleh pihak perbankan semakin banyak, sehingga akan meningkatkan jumlah pendapatan bagi pihak bank atas penerimaan dari bunga pinjaman. Dengan semakin tinggi rasio LDR, maka perusahaan akan memperoleh tambahan dana lebih dari masyarakat yang akhirnya dapat disalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan (Barus dan Lu, 2013).

Menurut Anisa dan Agus (2014) menyatakan bahwa LDR berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit perbankan. Tingkat LDR yang tinggi menunjukkan bahwa penawaran uang yang dilakukan oleh bank cukup tinggi. Semakin tinggi rasio tersebut mengindikasikan semakin besarnya jumlah kredit yang disalurkan namun tidak diimbangi dengan penerimaan dana pihak ketiga.

2.3 Studi Empiris

Obaid M Fahmi (2016), dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh keuangan inklusif terhadap kredit yang disalurkan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia menggunakan analisis regresi data panel menunjukkan akses perbankan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit pada sektor UMKM di Indonesia. Ia juga meneliti hubungan dimensi pengguna terhadap kredit dan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kredit

pada sektor UMKM. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol LDR dan NPL yang menunjukkan bahwa LDR dengan variabel akses dan variabel penggunaan layanan perbankan berpengaruh positif signifikan. Sedangkan NPL mempunyai pengaruh negatif namun tidak signifikan.

Andrew Mandolang dkk. (2017), dalam penelitiannya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi kredit UMKM di Sulawesi Utara menunjukkan bahwa dana pihak ketiga mempunyai pengaruh positif terhadap kredit UMKM di Sulawesi Utara. Secara individu juga pada menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan. Selanjutnya NPL mempunyai pengaruh yang positif terhadap kredit UMKM di Sulawesi Utara. Hal ini bertolak belakang dengan teori dimana hubungan antara NPL dengan kredit UMKM yang menyatakan adanya hubungan negatif antara kedua variabel tersebut. Hasil secara individu pengaruh NPL terhadap kredit UMKM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kredit UMKM.

Komang Agus Rudi (2017), dalam penelitiannya yang berjudul dampak pertumbuhan inklusi keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia bahwa pertumbuhan kredit UMKM berpengaruh negatif terhadap NPL yang dikaitkan dengan stabilitas yang lebih baik. Peningkatan jumlah kredit UMKM dan disisi lain secara umum terjadi penurunan jumlah NPL.

Herispon (2019), dalam penelitiannya yang berjudul *the effect of financial inclusion and banking behavior household debt behavior* bahwa inklusi keuangan dengan variabel akses, pengguna, kualitas, dan kekayaan berpengaruh positif terhadap perilaku kredit rumah tangga.

2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Keuangan inklusif yaitu mendorong masyarakat dapat mendapatkan akses keuangan di lembaga formal seperti perbankan. Indonesia masih merupakan negara dengan tingkat keuangan inklusif yang masih rendah. Masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan jasa keuangan. Beberapa masyarakat masih menabung uangnya sendiri di rumah dan juga banyak yang takut berhubungan dengan lembaga keuangan. Dilingkup masyarakat banyak yang gengsi atau malu jika melakukan kredit di perbankan. Hal inilah yang merupakan salah satu penyebab rendahnya tingkat keuangan inklusif di Indonesia.

Oleh karena itu, saat ini pemerintah mendorong masyarakat agar dapat mengakses pada jasa keuangan. Salah satu yang menjadi fokus utamanya yaitu penyaluran kredit pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Prospek UMKM sangat menunjang perekonomian negara namun masih banyak yang kekurangan modal. Karena itu salah satu solusi untuk membantu permodalannya yaitu kredit. Namun untuk UMK masih banyak yang belum bisa menerima kredit karena pengelolaan usahanya yang tidak terkelola dengan baik seperti laporan keuangan. Di antara tiga jenis usaha tersebut tingkat penyaluran kredit di usaha mikro dan kecil masih rendah dibandingkan usaha menengah.

Kredit UMK dipengaruhi indikator keuangan inklusif yaitu dimensi akses dan dimensi penggunaserta menggunakan NPL dan LDR sebagai variabel kontrol. Sharma (2015) menemukan bahwa hubungan yang kuat antara penetrasi perbankan dengan pertumbuhan penetrasi dalam hal ini yaitu jumlah pengguna dan kantor bank.

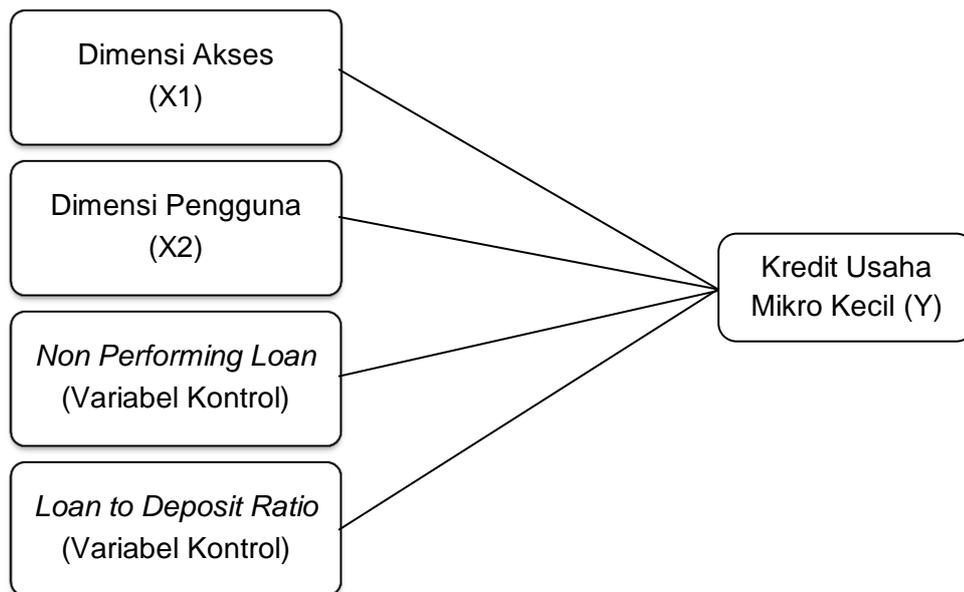
Dimensi pengguna berpengaruh terhadap kredit UMK. Dimensi yang dimaksud adalah jumlah rekening kredit, kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat luas adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit (Kasmir,2011:65). Kredit yang disalurkan bank kepada masyarakat akan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat karena kredit tersebut dapat digunakan untuk melakukan investasi serta keperluan konsumsi.

Pada gambar, NPL memiliki hubungan dengan kredit UMK. NPL adalah rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah kredit bermasalah, apakah termasuk kredit yang diragukan, kurang lancar, atau macet terhadap total kredit yang disalurkan oleh bank. Semakin tinggi rasio NPL mencerminkan bahwa semakin banyaknya jumlah kredit macet yang terdapat pada perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi tingkat kesehatan perusahaan yang akhirnya dapat menurunkan jumlah pendapatan yang mampu diterima oleh perusahaan, baik penerimaan atas pengembalian pinjaman maupun penerimaan bunga atas pinjaman. Perusahaan dengan tingkat kredit macet yang bermasalah dapat menghambat perputaran uang di dalam perusahaan perbankan, sehingga perusahaan akan kesulitan untuk menyalurkan kembali dananya kepada pihak lain dapat pula meningkatkan risiko bagi perbankan sendiri (Barus dan Lu, 2013).

LDR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur hubungan antara jumlah keseluruhan kredit yang disalurkan bank terhadap dana yang dihimpun dari pihak ketiga, baik berupa tabungan, giro, dan deposito. Semakin tingginya rasio LDR mencerminkan bahwa sejumlah kredit yang diberikan oleh pihak perbankan semakin banyak, sehingga akan meningkatkan jumlah pendapatan bagi pihak bank atas penerimaan dari bunga pinjaman. Dengan semakin tinggi rasio LDR, maka perusahaan akan memperoleh tambahan dana lebih dari

masyarakat yang akhirnya dapat disalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan (Barus dan Lu, 2013).

Berdasarkan uraian di atas maka bagan kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Bagan Pikir Penelitian

2.5 Hipotesis

Adapun hipotesis yang dibangun dari permasalahan penelitian ini adalah :

- a. Diduga dimensi akses berpengaruh positif terhadap kredit usaha mikro kecil di Sulawesi Selatan
- b. Diduga dimensi pengguna berpengaruh positif terhadap kredit usaha mikro kecil di Sulawesi Selatan
- c. Diduga *non performing loan* berpengaruh negatif terhadap kredit usaha mikro kecil di Sulawesi Selatan
- d. Diduga *loan to deposit ratio* berpengaruh positif terhadap kredit usaha mikro kecil di Sulawesi Selatan